



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

10. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

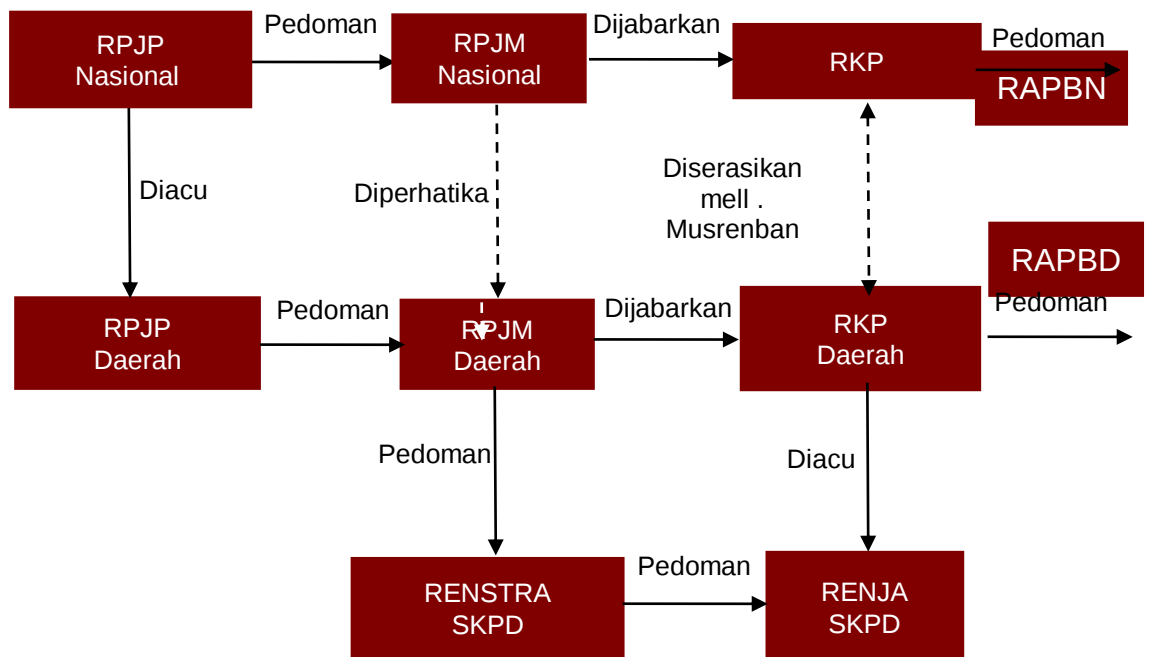
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kota Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Dalam penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar dijabarkan dalam Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD adalah merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renstra berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan Perda RPJMD, sedangkan salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD adalah Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra PD dengan Renstra KL dan Renstra Provinsi yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Renstra KL dan Renstra Provinsi. Sedangkan Keterkaitan Renstra PD dengan Renja Perangkat Daerah adalah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja PD tahun berkenaan harus berpedoman dan sesuai pada program kegiatan pada Renstra PD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adanya beberapa hal sebagai berikut :

1. Tindaklanjut pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemetaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHCHD TA 2023 dan DAK TA 2023.
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil

pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor:
050/775/410.201.3/2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan pada :

1. Undang – undang No 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
3. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011- 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026;
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
39. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah untuk menyesuaikan sub kegiatan dan target kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026.

Sedangkan Tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan |
| 1.1 | Latar Belakang |
| 1.2 | Landasan Hukum |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan |
| 1.4 | Sistematika Penulisan |
| Bab II | Gambaran Pelayanan perangkat Daerah |

	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III		Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
Bab IV		Tujuan dan Sasaran
	4.1	Tujuan dan Sasaran menengah Perangkat Daerah
Bab V		Strategi Dan Arah Kebijakan
Bab VI		Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Bab VII		Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
Bab VIII		Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 26 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Walikota Blitar dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar .

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan
- f. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan)
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- l. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- m. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

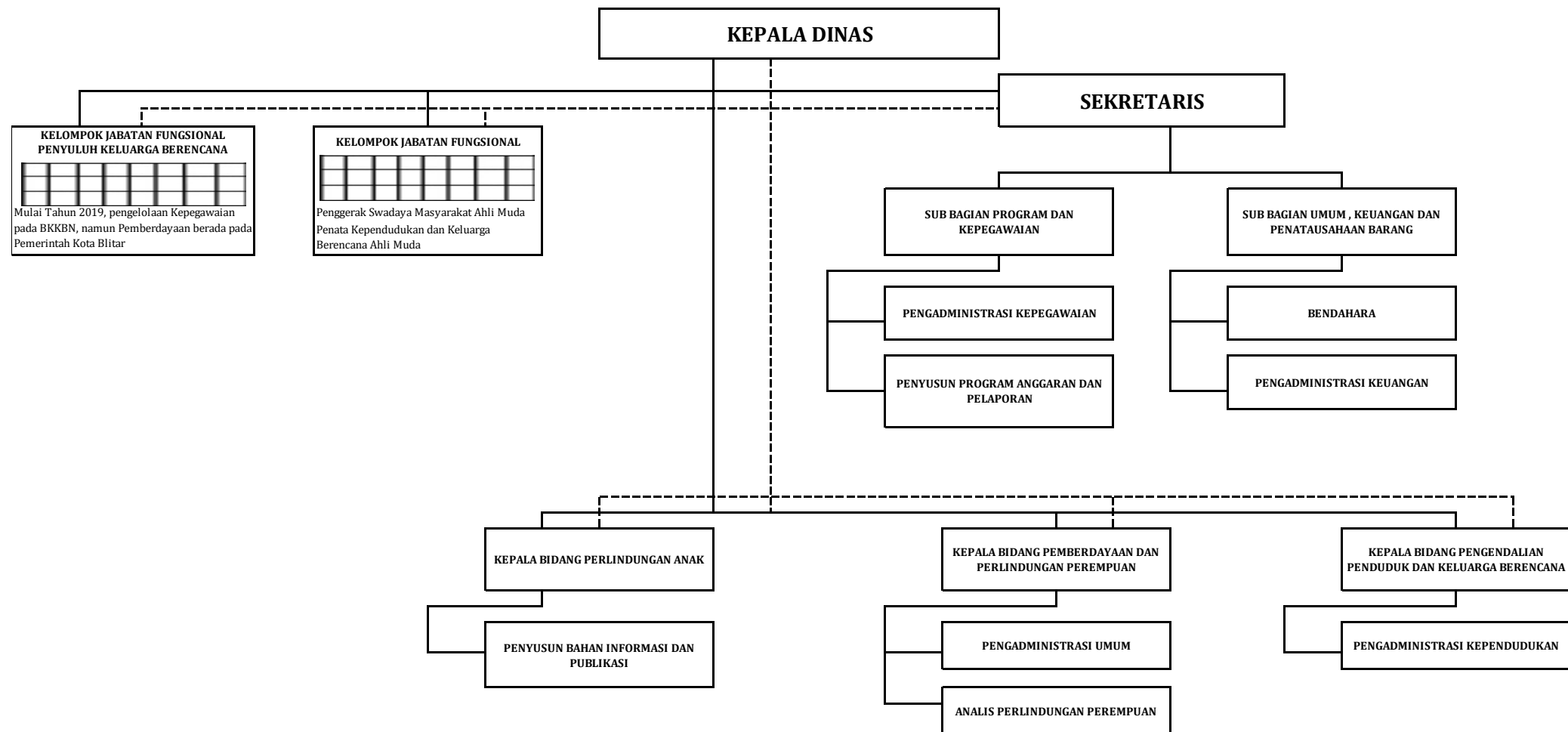
Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
6. Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.

8. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
9. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.
11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
12. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagan 2.2

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB



2.3. Sumber Daya Dinas P3AP2KB

a. Sumber Daya Manusia

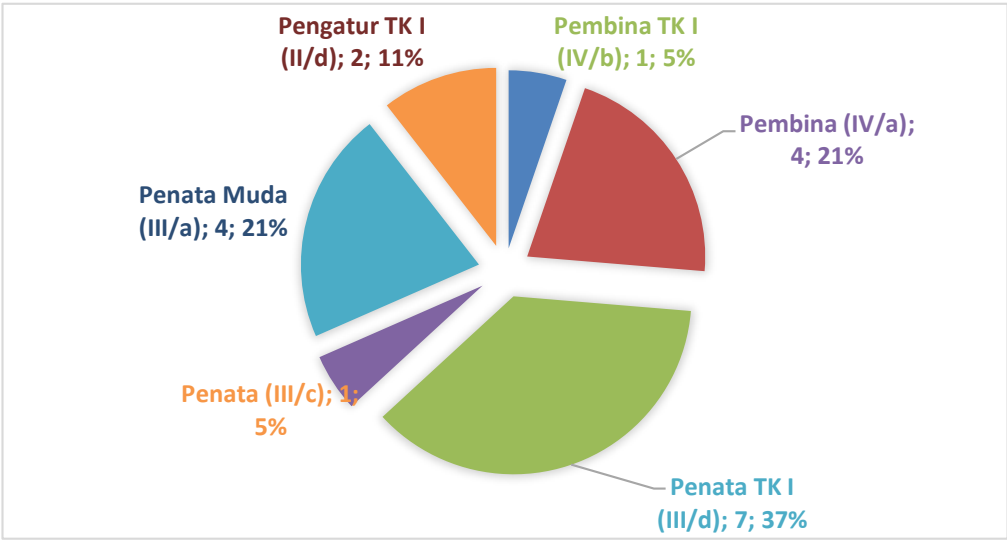
Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 27 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	
3	Pembina TK I (IV/b)	1	-	1	
4	Pembina (IV/a)	1	3	4	
5	Penata TK I (III/d)	1	6	7	
6	Penata (III/c)	-	1	1	
7	Penata Muda TK I (III/b)	-	-	-	
8	Penata Muda (III/a)	1	3	4	
9	Pengatur TK I (II/d)	1	1	2	
10	Pengatur (II/c)	-	-	-	
11	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	-	
12	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	
Jumlah		8	16	19	

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2023)

Diagram 2.3.1
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang



(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2023)

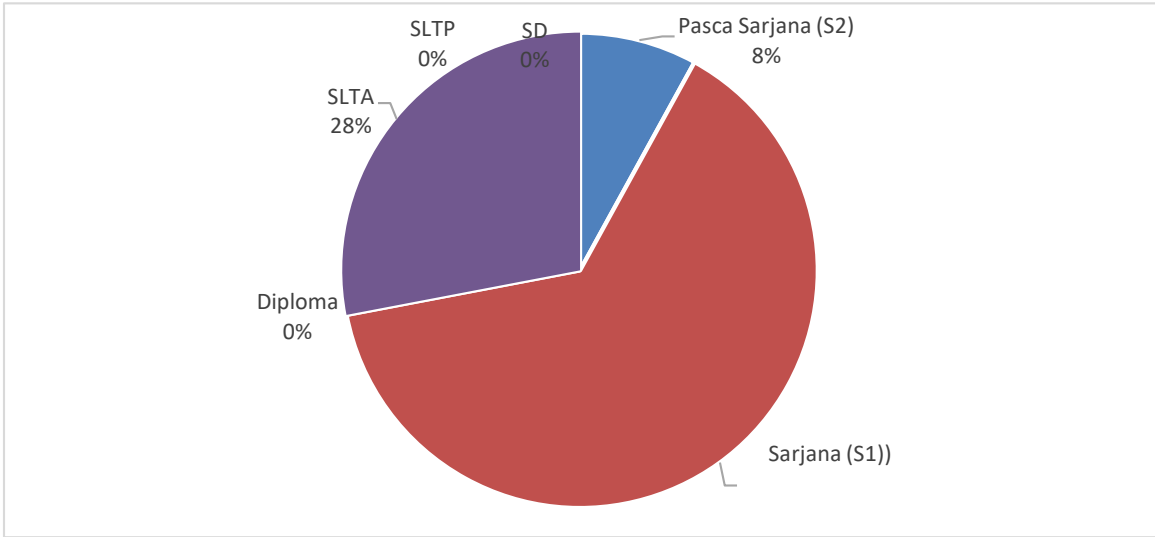
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3	
2	Sarjana (S1)	1	12	13	
3	Diploma	-	-	-	
4	SLTA	2	1	3	
5	SLTP	-	-	-	
6	SD	-	-	-	
	Jumlah	5	14	19	

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2023)

Diagram 2.3.2
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pendidikan



(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2023)

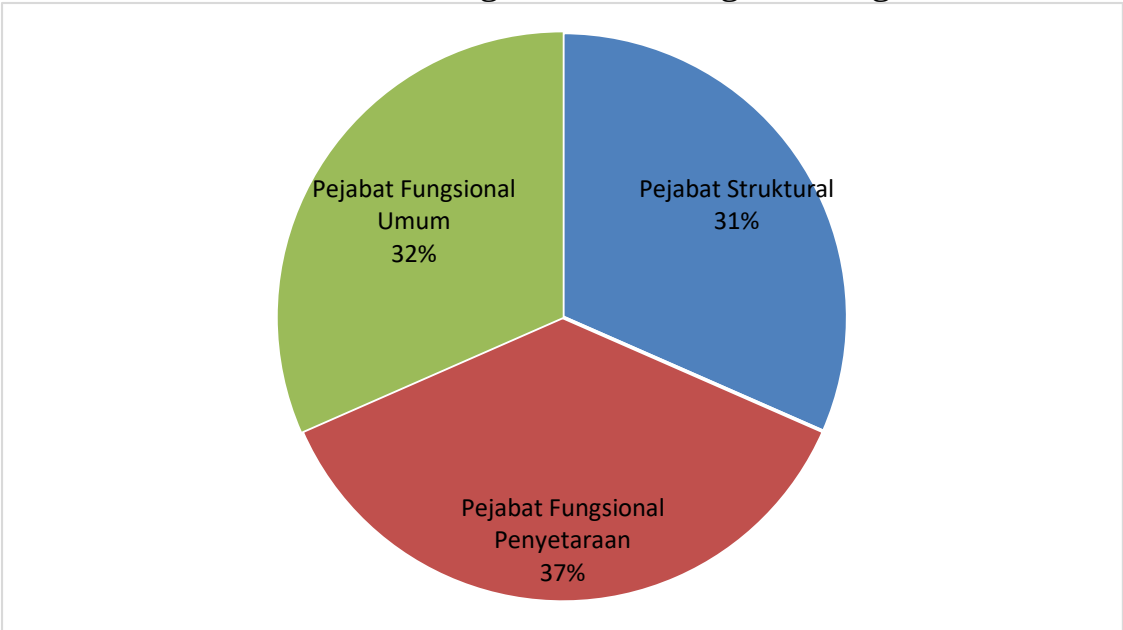
Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non structural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.3.3
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pejabat Struktural	1	5	6	
2	Pejabat Fungsional Penyetaraan	2	5	7	
3	Pejabat Fungsional Umum	2	4	6	
	Jumlah	5	14	19	

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2023)

Diagram 2.3.3
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang



(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2023)

- b. Sarana Prasarana
- Gedung yang digunakan Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah di jalan Dr. Sutomo Nomor 50 Kota Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang kerja sekretariat, 3 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat, Gudang Alokon, Sekretariat Bersama KP2A dst. Semua ruang kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Balai Penyuluhan KB berada di sekitar wilayah kantor Kecamatan di Kota Blitar dengan kantor yang masih belum memadai dikarenakan sempitnya lahan dan belum adanya petugas kebersihan serta keamanan. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4
Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas P3AP2KB Kota Blitar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil	4	Baik
2	Sepeda Motor	36	Baik
3	Mesin ketik	1	Baik
4	Lemari Arsip	12	Baik
5	Filling Besi	3	Baik
6	Brankas	1	Baik
7	Papan Pengumuman	3	Baik
8	Peta	1	Baik
9	Buffet	1	Baik
10	Kursi	125	Baik
11	Meja	108	Baik
12	Kursi Putar	12	Baik
13	Ac spilt	15	Baik
14	Kipas Angin	2	Baik
15	TV	3	Baik
16	Wireless	1	Baik
17	Kamera	1	Baik
18	Handycame	1	Baik
19	LCD Proyektor	3	Baik
20	Komputer PC	13	Baik
21	Laptop	7	Baik
22	Printer	14	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
23	Telepon	7	Baik
24	Layar LCD	2	Baik

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2022)

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB

Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar didasarkan pada target Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2016-2021. Capaian Pelayanan Kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar selama tahun 2016 – 2021, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi PD	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan			NA	35,64 %	35,77 %	35,90 %	36,02 %	36,15 %	NA	35,77 %	33,02 %	37,99 %	42,17 %	42,17 %	NA	100,36 %	92,31%	105,82 %	117,07 %	116,65%
2	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	71%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,88	0,67	0,7	0,64	0,65	0,65	127,87 %	145,08 %	142,62 %	147,54 %	146,72 %	146,72%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian Indikator Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dikategorikan sangat baik. Namun pada tahun 2016 tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan indicator tersebut baru menjadi indicator kinerja utama Dinas P3AP2KB Kota Blitar mulai tahun 2017. Dengan sebelumnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) yang menjadi indicator tujuan renstra yang merupakan indicator sasaran RPJMD Kota Blitar.
2. Capaian Indikator Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga selalu tercapai setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus yang dilaporkan selalu mendapatkan penanganan dan terselesaikan oleh tim.
3. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk juga semakin tahun meningkat capaiannya.

Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realis asi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas P3AP2 KB Kota Blitar	4.036.689.797	4.790.600.409	5.458.831.855	5.228.133.381	5.525.909.069	3.952.256.526	4.648.631.550	5.159.057.259	4.845.142.027	5.233.076.376	97,91 %	97,04 %	94,51 %	92,67 %	94,70 %	0,059	0,064

Dari tabel diatas diketahui bahwa :

1. Tren jumlah anggaran tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Hal ini menyesuaikan kebutuhan anggaran dan kompleksitas pekerjaan pada Dinas P3P2KB Kota Blitar.
2. Tren realisasi anggaran tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran, sisa lelang, beberapa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena pandemi COVID-19.

- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta Keluarga Kerencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka membangun Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Kerencana.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

2.5.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- Belum adanya Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
- Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi

- Prosentase / Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga meningkat
- Masih adanya kasus KDRT
- Masih adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
- Masih adanya kasus pernikahan dini
- Angka TFR masih diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur
- Belum semua sekolah terbentuk PIK R
- Sistem Pengaduan / Pelaporan kasus perempuan dan anak masih bersifat manual (belum memanfaatkan IT)
- Belum adanya kerjasama dengan panti rehabilitasi

2.5.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang
- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi Hal yang Tabu
- Adanya 21 Organisasi Wanita
- Adanya komunitas pendidikan formal dan informal
- Adanya PPKBD dan Sub PPKBD
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti / Yayasan Sosial
- Adanya lembaga psycology / guru BP
- Adanya Dewan Perwakilan Anak (Forum Anak) Kota Blitar
- Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kota Blitar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Hasil Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya kesenjangan gender	Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender	Belum tersedianya Perda tentang PUG
		Rendahnya kapasitas SDM perempuan
		Minimnya peluang partisipasi perempuan di ranah public
		Minimnya peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	Belum optimalnya perlindungan anak
Belum optimalnya pengendalian penduduk	Menurunnya Tren Capaian Kesertaan KB Aktif/CPR	Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait kontrasepsi kepada pasangan muda

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum tersedianya akses informasi pelayanan KB yang mengikuti perkembangan teknologi terkini
		Belum optimalnya Strategi advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program pengendalian penduduk dan KB
	Masih Tingginya angka <i>Unmet Need</i>	Masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern)
		Belum terintegrasinya Data Keluarga dengan Data - Data Kependudukan lainnya
	Tingginya angka usia pernikahan dini	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan pada remaja, calon pengantin dan masyarakat kurang optimal
		Belum Optimalnya Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga
	Belum optimalnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya Kepesertaan KB pada sasaran khusus utamanya KB Pria (MOP)
		Belum optimalnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengikuti Program KB

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi dan Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan Kota Blitar 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode kepemimpinan Wali Kota Blitar seperti yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Penelaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan program prioritas pada RPJMD yang harus diampu Dinas P3AP2KB sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas P3AP2KB, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas P3AP2KB yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Berikut disajikan matrik hasil penelaahan Visi, Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 :

Tabel 3.2.1
Hasil Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi / Misi / Program Kerja Wali Kota / Wakil Wali Kota	Tupoksi Dinas P3AP2KB	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat Misi : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter Tujuan : 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM Sasaran : 1. Menurunnya kesenjangan gender 2. Meningkatkan pengendalian penduduk Indikator : 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Program Prioritas Pada RPJMD : • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	• Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender • Belum optimalnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak • Menurunnya Tren Capaian Kesertaan KB Aktif/CPR • Masih Tingginya angka <i>Unmet Need</i> • Tingginya angka usia pernikahan dini • Belum optimalnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	• Kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM • Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan • Masih adanya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada perempuan dan anak lainnya sehingga perlu meningkatkan penanganannya • Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan • Nilai TFR masih 2,30 yaitu masih relatif tinggi diatas nilai TFR Provinsi Jawa Timur • Keikutsertaan KB yang cenderung menurun	• Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah • Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera • Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Visi / Misi / Program Kerja Wali Kota / Wakil Wali Kota	Tupoksi Dinas P3AP2KB	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
• Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota				

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Sehubungan pada organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar menangani 3 (tiga) urusan yang berbeda sehingga telaah renstra dari kementerian ataupun Provinsi juga ada 3 (tiga), antara lain :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat visi dan misi sebagai berikut : VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”. MISI : Mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan.

Tujuan dari Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah : Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan; Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari Pembangunan Perlindungan Anak adalah : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup

anak; Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi; Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Sedangkan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA KELUARGA KECIL SEJAHTERA”, sedangkan misi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender diberbagai Bidang Pembangunan,
- b. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak,
- c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program Keluarga Berencana yang responsive Gender.

2. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik Pusat dan Provinsi Jawa Timur memiliki Visi dan Misi yang sama, yaitu :

VISI : “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”

Sedangkan MISI adalah :

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi Jawa Timur agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah “Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat berkelanjutan.

Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

1. Wisata Kebangsaan; Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya.
2. Pengembangan sektor pertanian; pengembangan sektor pertanian akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar.
3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut.
4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk dihuni, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan.

Memperhatikan tujuan penataan ruang Kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka sebagai SKPD, Dinas P3AP2KB yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kependudukan serta Keluarga Berencana sangat mendukung dan mempunyai kontribusi besar untuk mewujudkan Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030.

Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut ruang pemberdayaan, maka sasaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah memfasilitasi ruang pemberdayaan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam

pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya Sosialisasi dan Pendekatan kepada masyarakat yang terorganisir, terukur dan sistematis.

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, diperlukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan kajian KLHS RPJMD Kota Blitar 2021-2026, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditunjukkan dari relevansi isu strategis dengan indikator TPB yang relevan dengan Dinas P3AP2KB adalah isu strategis menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB, Dinas P3AP2KB masuk dalam TPB pilar sosial.

Terdapat 4 (empat) isu dalam pilar sosial di Kota Blitar yaitu kemiskinan, ketahanan pangan dan tingkat kesehatan masyarakat serta menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat. Kemiskinan dan kesehatan masyarakat terkait dengan adanya pandemi Covid-19. Kecukupan pangan di Blitar menjadi isu strategis akibat lahan pertanian yang semakin menyempit akibat alih fungsi lahan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pendekatan dan keterlibatan para pihak dalam mengatasi kesenjangan gender
2. Pemberdayaan Perempuan di sektor politik, ekonomi dan hukum belum sepenuhnya optimal
3. Belum optimalnya kesadaran akan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan Perempuan dan anak
5. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi
6. Masih adanya pasangan usia subur yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
7. Kurang optimalnya kinerja perangkat daerah (SAKIP)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2022 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya kesenjangan gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang meliputi 3 komponen yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP (Equality Distributed Equivalent Percentage) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang equivalent dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen nilai EDEPnya dibagi 50	indeks	67,66	67,87	68,61	67,87	67,87

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG $\frac{1}{3} (Ipar + IDM + linc-dis)$ Ipar : Indeks Keterwakilan parlemen IDM : Indeks pengambilan keputusan linc-dis : indeks distribusi pendapatan						
		Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	Kelembagaan PUG yang aktif yaitu kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem	Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG dibagi jumlah lembaga yang ada di Kota Blitar, dikali 100%	Persen	47,25	47,26	55,03	47,28	47,28

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan							
		Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Lima bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan mental, trafficking dan eksploitasi dan kekerasan seksual.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan di bagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali 100 %	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali 100%	persen	100,00	100,00	100	100,00	100,00
2	Meningkatnya pengendalian penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	● Metode atau cara yang digunakan untuk mengukur atau menghitung perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam	LPP : penduduk akhir-penduduk awal/penduduk awal x 100% Penduduk akhir adalah jumlah	persen	0,67	0,67	0,617	0,67	0,60

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kurun waktu tertentu. ● Laju pertumbuhan penduduk mengacu apada persentase perubahan jumlah penduduk dari awal periode ke akhir periode, biasanya diukur dalam satuan persen per tahun.	penduduk pada akhir periode yang diukur Penduduk awal adalah jumlah penduduk awal periode yang diukur.						
		Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	- TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita - Wanita usia subur mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	Angka	2,14	2,14	1,92	2,13	1,90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasu manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD Nilai A pada Range >80-90	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A 85,56	A 82	A 85,32	A 83	A 85,29

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi Periode Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Meningkatnya pemberdayaan gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang meliputi 3 komponen yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP (Equality Distributed Equivalent Percentage) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang equivalent dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen nilai EDEPnya dibagi 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG $1/3 (Ipar + IDM + Iincdis)$ Ipar : Indeks Keterwakilan parlemen IDM : Indeks pengambilan keputusan	indeks	68,6	68,61	74,2	75,50	76,59	76,59

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi Periode Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					linc-dis : indeks distribusi pendapatan							
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	Kelembagaan PUG yang aktif yaitu kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi Perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara Perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan	Jumlah kelembagaan PUG yag aktif dibagi jumlah kelembagaan PUG, dikali 100%	Persen	-	55,03	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi Periode Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
				dan tingkatan pemerintahan								
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Lima bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan mental, trafficking dan eksploitasi dan kekerasan seksual.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan di bagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali 100 %	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi Periode Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
				untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya								
2	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	- Metode atau cara yang digunakan untuk mengukur atau menghitung perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. - Laju pertumbuhan	LPP : penduduk akhir-penduduk awal/penduduk awal x 100% Penduduk akhir adalah jumlah penduduk pada akhir periode yang diukur Penduduk awal adalah jumlah penduduk awal periode yang diukur.	Persen	0,63	0,617	0,67	0,65	0,65	0,65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi Periode Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
				n penduduk mengacu pada persentase perubahan jumlah penduduk dari awal periode ke akhir periode, biasanya diukur dalam satuan persen per tahun.								
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	- TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita - Wanita usia subur mempunyai	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur	Angka	2,14	1,92	1,94	1,94	1,94	1,94

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi Periode Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
				organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun								
3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasu manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD Nilai A pada Range >80-90	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,32	85,32	85,32	85,34	85,36	85,36

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas P3AP2KB adalah strategi dan kebijakan Dinas P3AP2KB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB menunjukkan bagaimana cara Dinas P3AP2KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB. Strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P3AP2KB

VISI	:	Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT		
MISI I	:	Mewujudkan Tata Kehidupan yang religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam kebudayaan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemberdayaan gender		Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
				Peningkatan kapasitas perempuan
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
			Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
MISI I	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter KEREN (keberagaman, religius, nasionalis), Sehat dan Berdaya Saing		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT		
MISI I	:	Mewujudkan Tata Kehidupan yang religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam kebudayaan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera	Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
				Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
				Peningkatan kerjasama antar <i>Stakeholders</i> dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)
				Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
MISI I	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter KEREN (keberagaman, religius, nasionalis), Sehat dan Berdaya Saing		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab V, Dinas P3AP2KB Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Adapun program yang menjadi program unggulan Dinas P3AP2KB yaitu :

1. Penilaian/Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
2. Sekolah Perempuan
3. Penilaian/Penghargaan Kota Layak Anak (KLA)
4. Duta Generasi Berencana (Duta Gen-Re)
5. Peringatan Hari Keluarga Nasional

Inovasi yang dilaksanakan di Dinas P3AP2KB Kota Blitar guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas yaitu :

1. PAK GIMIN SMANGAT (Paket Gizi Ibu Hamil Nambah Sehat Mencegah Stunting)
2. SIIP MAS (Suami Ikut MOP, Nyaman, Hebat dan Sejahtera)

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 serta pendanaan disajikan dalam *Tabel 6.1* sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
1	4	5			6	7	8			9	10
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A	A				DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM (Kriteria standar adalah sesuai dengan Dokumen IKM)			82	4.370.893.899	83,1	4.250.100.702	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun x 100			100%	45.445.600	100	45.445.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		NA	7 dokumen	12.195.600	7	12.195.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		NA	13 dokumen	33.250.000	13	33.250.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan yang tersusun x 100			100%	3.339.163.766	100	3.251.467.838	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		28 Orang	28 Orang	3.335.173.766	24	3.247.477.838	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun		2 Dok	2 Dok	3.990.000	2	3.990.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/ jumlah pelayanan administrasi perangkat daerah) x 100			100%	45.493.200	100	44.481.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		NA	33 orang	17.530.500	33	16.518.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		NA	99 paket	27.962.700	99	27.962.700		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan sarana prasarana perkantoran yang tercukupi	(Jumlah layanan sarana prasarana perkantoran yang tercukupi/ jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah)x 100			100%	262.455.729	100	229.630.250	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		15 jenis	15 jenis	9.248.200	15	9.248.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang tersedia	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang tersedia		5 paket	5 paket	20.457.400	5	20.457.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		NA	15 paket	31.513.800	15	31.513.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		5 Jenis	5 paket	21.752.400	5	21.752.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 jenis	2 dokumen	4.321.400	2	4.320.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		103 Rakor	103 Rakor	142.693.000	103	142.338.450	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/jumlah penyediaan jasa penunjang urusan) x 100			100%	67.782.565	100	245.795.311	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		NA	4 laporan	1.200.000	4	1.200.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		9 Rekening	9 laporan	65.080.165	9	84.151.165	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 kali	3 laporan	1.502.400	3	177.104.564	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang trpelihara sesuai standar	(Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/Jumlah BMD) x 100			100%	448.349.404	100	433.280.103	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 unit	45 unit	116.342.800	45	102.412.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 jenis	5 unit	13.307.500	5	13.307.500	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3 unit	3 unit	302.211.104	3	301.072.003	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		9 jenis	9 jenis	16.488.000	9	16.488.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			67,66	67,8				DP3AP2KB	Kota Blitar
	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif			47,25%	47,26%				DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibagi Jumlah perangkat daerah x 100		100%	100%	869.774.900	100	1.325.928.734	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Jumlah perempuan pelaku sektor bisnis dibagi jumlah perempuan x 100		0,29%	0,33%		0,21			
		Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Jumlah perempuan yang terfasilitasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dibagi jumlah perempuan x 100		45,32%	45%		32,86			
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Jumlah dokumen ARG yang dianalisis dibagi jumlah kegiatan x 100		22,12%	27%	83.484.700		113.976.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta Penguatan kelembagaan APE	Jumlah peserta Penguatan kelembagaan APE		NA	70 orang	16.219.800	70	66.194.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta Sosialisasi percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG	Jumlah peserta Sosialisasi percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG		NA	55 orang	13.135.300	55	12.635.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan dan movev PPRG	Jumlah peserta pelatihan dan movev PPRG		NA	88 orang	21.958.800	88 orang	16.869.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah dokumen up dating data gender	Jumlah dokumen up dating data gender		NA	1 dokumen	32.170.800	1	18.277.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan dibagi jumlah perempuan sektor bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		13,89%	13,89%	206.378.900	13,89	638.127.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota PEKKA yang mengikuti pelatihan Kue Kering, merias, kue basah, olahan dan pembagian sembako	Jumlah anggota PEKKA yang mengikuti pelatihan Kue Kering merias, kue basah, olahan dan pembagian sembako		NA	210 orang	80.365.400	200	510.025.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah perempuan yang mengikuti Workshop Perdamasra/Seminar PEKKA	Jumlah perempuan yang mengikuti Workshop Perdamasra/Seminar PEKKA		NA	200 orang		100	25.888.700		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta Forum Puspa	Jumlah peserta Forum Puspa		NA	35 orang	126.013.500	35	24.009.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah peserta Sekolah Perempuan	Jumlah peserta Sekolah Perempuan		NA	100 orang		250	78.204.100		
		Jumlah kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah kegiatan Pembinaan P2WKSS		NA	2 kegiatan					
		Jumlah peserta Workshop peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik	Jumlah peserta Workshop peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik		NA	75 orang					
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi		2 organisasi	3 organisasi	579.911.400	3	573.825.034	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus GOW yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota organisasi perempuan	Jumlah pengurus GOW yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota organisasi perempuan		NA	39 orang		-	-	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah bingkisan kesejahteraan yang diberikan untuk pengurus GOW Kota Blitar	Jumlah bingkisan kesejahteraan yang diberikan untuk pengurus GOW Kota Blitar		NA	39 paket		39	13.650.000		
		Jumlah fasilitasi kesekretariatan GOW Kota Blitar	Jumlah fasilitasi kesekretariatan GOW Kota Blitar		NA	12 kali		12	6.035.000		
		Jumlah pengurus GOW yang mengikuti rapat koordinasi pengurus GGOW Kota Blitar	Jumlah pengurus GOW yang mengikuti rapat koordinasi pengurus GGOW Kota Blitar		NA	30 orang		30	10.710.000		
		Jumlah takjil yang dibagikan dalam bakti sosial bulan Ramadhan	Jumlah takjil yang dibagikan dalam bakti sosial bulan Ramadhan		NA	500 paket		500	9.050.000		
		Jumlah peserta seminar Hari Kartini	Jumlah peserta seminar Hari Kartini		NA	200		200	43.100.000		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota PKK yang mengikuti pelatihan ketrampilan	Jumlah anggota PKK yang mengikuti pelatihan ketrampilan		NA	75 orang		75	13.103.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah bingkisan yang diberikan kepada pengurus PKK Kota Blitar	Jumlah bingkisan yang diberikan kepada pengurus PKK Kota Blitar		NA	614 paket		614	213.077.034		
		Jumlah pengurus kesekretariatan PKK yang terfasilitasi	Jumlah pengurus kesekretariatan PKK yang terfasilitasi		NA	35 orang		35	122.983.300		
		Jumlah takjil yang dibagikan kepada masyarakat Kota Blitar	Jumlah takjil yang dibagikan kepada masyarakat Kota Blitar		NA	100 buah		100	16.459.000		
		Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat inti	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat inti		NA	250 orang		210	10.710.000		
		Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat pleno	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat pleno		NA	420 orang		420	34.290.000		
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan yang terfasilitasi	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan yang terfasilitasi		NA	1500 orang	83.504.300	1495	80.656.300	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan			100%	100%				DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan		100%	100%	319.211.860	100	195.798.320	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase - 964 -aka nak- 964 - aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap - 964 -aka nak- 964 -	Jumlah - 964 -aka nak- 964 - yang aktif sosialisasi dibagi jumlah - 964 -aka nak- 964 - yang mengikuti sosialisasi		NA	100%	22.427.960	100	59.631.320	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO		36 orang	37 orang	22.427.960	37	59.631.320	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase - 964 -aka nak- 964 - korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah - 964 -aka nak- 964 - korban kekerasan dibagi jumlah kasus yang tertangani		100%	100%	233.428.500	100	33.092.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Jumlah fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)		12 bulan	12 bulan		2	6.386.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah - 964 -aka nak Satgas PPA yang mendapat insentif	Jumlah - 964 -aka nak Satgas PPA yang mendapat insentif		44 orang	44 orang		42	25.200.000		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pendampingan - 964 -aka nak- 964 - korban kekerasan	Fasilitasi pendampingan - 964 -aka nak- 964 - korban kekerasan		12 bulan	12 bulan	53.503.400	12	1.506.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase - 964 -aka nak- 964 - yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah - 964 -aka nak- 964 - yang berpartisipasi dibagi jumlah - 964 -aka nak- 964 - yang mengikurti sosialisasi		100%	100%	179.925.100	100	103.074.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.03.2.03.02	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Bingkisan Hari Raya Anggota P2TP2A	Jumlah Bingkisan Hari Raya Anggota P2TP2A		NA	35 paket	63.355.400	35	12.250.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah pertemuan Satgas PPA	Jumlah pertemuan Satgas PPA		NA	3 pertemuan	63.355.400	3	4.080.000		
		Jumlah pertemuan Anggota P2TP2A	Jumlah pertemuan Anggota P2TP2A		NA	4 pertemuan		4	40.075.900		
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak		100%	100%				DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan pelebmbagaan pemenuhan hak anak	Jumlah kelembagaan pemenuhan - 965 -hak anak yang terlibat dibagi jumlah lembaga		100%	100%	91.218.000	100	68.494.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.06.2.01	Pelebmbagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah anak yang berpartisipasi dibagi jumlah anak yang terlibat			100%	36.479.900	100	26.084.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebmbagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Forum Anak	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Forum Anak		NA	6 kegiatan	36.479.900	6	26.084.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang menjadi indikator dibagi jumlah lembaga yang terfasilitasi		-	100%	54.738.100	100	42.410.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta pemilihan Duta Anak	Jumlah peserta pemilihan Duta Anak		NA	100 orang	28.072.100	100	22.550.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah peserta Gebyar Anak	Jumlah peserta Gebyar Anak		NA	100 orang					
		Jumlah peserta Musrenbang Anak	Jumlah peserta Musrenbang Anak		NA	60 Orang					
		Jumlah Fasilitasi Puspaga	Jumlah Fasilitasi Puspaga		NA	12 Bulan					
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kulitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kota Layak Anak	Jumlah Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kota Layak Anak		NA	12 bulan	8.403.600	12	6.333.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan De Kelana	Jumlah Pembinaan De Kelana		NA	1 kegiatan	18.262.400	1	13.526.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus kekerasan yang ditangani		100%	100%	313.266.460	100	342.221.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Anak Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi dibagi jumlah lembaga yang diundang			100%	114.508.060	99,91	146.803.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi PPA	Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi PPA		NA	10 sekolah	82.633.200	10	10.441.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah peserta Sosialisasi PPA	Jumlah peserta Sosialisasi PPA		NA	30 orang		30	7.349.200		
		Jumlah media untuk Publikasi PPA (4 Jenis ; Roll Banner Listrik, Siaran Radio, Leaflet, Talkshow - Dialog Interaktif)	Jumlah media untuk Publikasi PPA (4 Jenis ; Roll Banner Listrik, Siaran Radio, Leaflet, Talkshow - Dialog Interaktif)		NA	3 jenis		3	49.229.000		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO		NA	35 orang	31.874.860	35	64.226.600	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Jumlah anak korban yang mendapat layanan dibagi jumlah kasus yang ditangani			100%	156.651.500	100	8.283.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pendampingan Anak korban kekerasan	Jumlah Fasilitas Pendampingan Anak korban kekerasan		NA	12 Bulan	156.651.500	12	8.283.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah lembaga penyedia layanan dibagi jumlag total lembaga yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas hidup anak			100%	42.106.900	100	97.240.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Workshop KHA	Jumlah Peserta Workshop KHA		NA	60 orang	42.106.900	60	25.190.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Jumlah Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)		NA	40 orang		40	9.149.000		
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan anak di Kelurahan Turi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan anak di Kelurahan Turi			30 orang		30	7.685.000		
		Jumlah Peserta Bimtek Pendampingan Psikososial Kebencanaan	Jumlah Peserta Bimtek Pendampingan Psikososial Kebencanaan			110 orang		110	55.215.300		
	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rata-rata anak yang dilahirkan selama masa usia subur		2,14	2,14				DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah data usia kawin dibagi jumlah usia produktif		22,78 th	22,88 th	99.837.200	25,6	230.173.665	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Nilai tengah data usia yang diukur		22 th	22,05 th	37..640.000	22,70	44.494.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Kelompok Siaga Kependudukan yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Siaga Kependudukan yang terfasilitasi		NA	4 kelompok	37.640.000	22,70	44.494.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Jumlah ketersediaan profil dibagi Jumlah data yang tersedia			100%	62.197.200	100	185.679.465	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Tersusunnya Profil Kependudukan dan KB	Jumlah Tersusunnya Profil Kependudukan dan KB		10 dokumen	10 dokumen	29.194.000	10	21.671.200	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Rumah Data yang menyediakan data dan informasi keluarga	Jumlah Rumah Data yang menyediakan data dan informasi keluarga		6 Rumah Data	6 Rumah Data	33.003.200	6	93.733.675	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			6 dokumen	0	6	70.274.590	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah pasangan Usia Subur yang tak ber-KB dibagi Jumlah pasangan usia subur		9,09	9,01	2.990.029.900	9,01	1.450.214.211	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Persentase peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur		74,31	74,32%		74,32			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah kecamatan terfasilitasi dibagi jumlah target terencana			3 kecamatan	419.304.100	3	237.800.011	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada			4 organisasi	120.042.000	4	4.365.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.01.01	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			4 dokumen	0	4	24.525.700	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media		2 media	4 media	0	4	65.836.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Massa yang digunakan untuk Promosi Program KB	Jumlah Media Massa yang digunakan untuk Promosi Program KB			6 laporan	0	3	50.055.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan pelaksanaan Rakorcam, Rakorkel dan Minilok	Jumlah laporan pelaksanaan Rakorcam, Rakorkel dan Minilok		6 kegiatan	6 kegiatan	57.949.000	6	34.854.600	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB	Jumlah Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB		150 orang	150 orang	0	6	58.163.711	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADPIN	Jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADPIN		1033 orang	150 orang	220.644.300	930	71.058.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Jumlah IMP yang terfasilitasi dibagi jumlah IMP yang ada		100%	100%	348.996.000	100	443.391.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Bingkisan Peningkatan Kesejahteraan bagi PPKBD	Jumlah Bingkisan Peningkatan Kesejahteraan bagi PPKBD		28 paket	28 paket	348.996.000	363	443.391.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah Kader KB yang menerima insentif	Jumlah Kader KB yang menerima insentif		345 Orang	345 Orang					
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP dibagi jumlah akseptor KB aktif			50,25%	2.071.762.800	50,25	700.603.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Klinik KB yang menerima pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB yang menerima pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi		NA	10 Klinik KB	58.825.000	12	4.852.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor terlayani pada KB MKJP	Jumlah Akseptor terlayani pada KB MKJP		NA	300 akseptor	785.746.600	300	146.558.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan KB		4 kegiatan	4 kegiatan	1.078.011.000	4	410.866.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah peserta monitoring dan evaluasi Program KB	Jumlah peserta monitoring dan evaluasi Program KB		NA	25 orang	47.668.600	25	41.773.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB yang dibina	Jumlah klinik KB yang dibina			25 klinik	0	25	10.475.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta penjangkaran calon akseptor	Jumlah peserta penjangkaran calon akseptor		300 orang	300 orang	50.991.200	279	37.099.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah akseptor yang terlayani pada pelayanan MOP	Jumlah akseptor yang terlayani pada pelayanan MOP			75 orang	50.520.400	81	48.419.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi dibagi jumlah kampung KB yang ada			100%	149.967.000	100	68.419.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK		6 kampung kb	6 kampung kb	149.967.000	100	68.419.200	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2020	K	Rp	K	Rp		
2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Prosentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Jumlah anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang dibagi jumlah anggota kelompok Tribina & UPPKS		74,31%	74,32%	170.291.200	74,32	839.439.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Jumlah anggota yang terbina dibagi jumlah total anggota kelompok			100%	170.291.200	74,32	839.439.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah peserta Pembinaan BKB	Jumlah peserta Pembinaan BKB		80 orang	80 Orang	98.269.200	80	596.439.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Jumlah peserta Pembinaan BKL	Jumlah peserta Pembinaan BKL		90 orang	90 Orang		35	7.200.300		
		Jumlah Peserta Pembinaan BKR	Jumlah Peserta Pembinaan BKR		80 orang	80 Orang		30	6.000.000		
		Jumlah Peserta Pembinaan Saka Kencana	Jumlah Peserta Pembinaan Saka Kencana		75 orang	75 Orang		25	7.023.300		
		Jumlah peserta pembinaan PIK-R	Jumlah peserta pembinaan PIK-R			80 orang		30	6.678.700		
		Jumlah Peserta Pembinaan UPPKA	Jumlah Peserta Pembinaan UPPKA		100 orang	100 Orang		30	9.356.000		
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang difasilitasi untuk pendampingan pencegahan stunting	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang difasilitasi untuk pendampingan pencegahan stunting			345 Orang	0	345	147.980.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Peserta Pembinaan PIK R	Jumlah Peserta Pembinaan PIK R		100 orang	100 Orang	48.376.800	100	44.221.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Keluarga Nasional		NA	2000 orang	23.645.200	2010	14.740.500	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3AP2KB Tahun 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A / 83		DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik / 83	3.995.517.538	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia x 100	Persen	100	39.546.095	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	8.620.095	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	30.926.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	Persen	100	3.242.215.447	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	3.238.593.047	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
208.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	3.622.400	DP3AP2KB	Kota Blitar.
208.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang tersedia x 100	Persen	100	76.265.230	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	33	34.685.230	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.05.10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	99	41.580.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ketersediaan administrasi umum sesuai standar dibagi jumlah ketersediaan administrasi umum x 100	Persen	100	178.985.361	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.588.881	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	16.780.153	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	13.551.207	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	9.183.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.533.670	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	5.400.000	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
208.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	104.985.250	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.962.700	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah penyediaan BMD yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah BMD tersedia x 100	Persen	100	7.824.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.824.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart dibagi jumlah jasa penunjang yang tersedia x 100	Persen	100	257.019.845	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.199.680	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	55.120.165	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	200.700.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jumlah BMD yang terpelihara dibagi jumlah BMD yang tersedia x 100	Persen	100	193.661.560	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	106.448.960	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	26.202.600	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	2023		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					K	Rp		
208.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60.010.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.000.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,87		DP3AP2KB	Kota Blitar
	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah lembaga PUG yang aktif dibagi jumlah lembaga PUG yang tersedia x 100	Persen	47,28		DP3AP2KB	Kota Blitar
208.02.00	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibagi jumlah perangkat daerah keseluruhan x 100	Persen	100	969.128.540	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Jumlah peningkatan perempuan pelaku sektor bisnis dibagi jumlah penduduk perempuan x 100	Persen	0,33			
		Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Jumlah perempuan pengambil keputusan dibagi jumlah penduduk perempuan x 100	Persen	46			
208.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Jumlah dokumen ARG yang dianalisis dibagi jumlah kegiatan yang melaksanakan PPRG x 100	Persen	32	37.640.770	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PUG	Dokumen	3	37.640.770	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan dibagi jumlah perempuan sektor bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi x 100	Persen	20,53	706.387.770	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
208.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	Dokumen	7	183.599.246	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	1	75.469.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Organisasi	3	225.100.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	21	73.450.166	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	614	223.860.560	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan x 100	Persen	100		DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
208.03.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan yang tersedia x 100	Persen	100	326.176.198	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah perempuan yang aktif sosialisasi dibagi jumlah perempuan yang mengikuti sosialiasi x 100	Persen	100	33.794.029	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	33.794.029	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus kekerasan pada perempuan x 100	Persen	100	199.604.195	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	1	43.249.340	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	2	156.354.855	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
208.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan yang tersedia x 100	Persen	100	92.777.974	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	110	46.819.298	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	45.958.676	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak	Persen	100		DP3AP2KB	Kota Blitar
208.06.00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelebagaan pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dibagi jumlah lembaga hak anak yang tersedia x 100	Persen	100	93.954.905	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibagi jumlah anak yang terfasilitasi x 100	Persen	100	32.039.770	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	32.039.770	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
208.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam Indikator Kota Layak Anak dibagi jumlah lembaga yang tersedia x 100	Persen	100	61.915.135	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak/Orang	100	31.146.670	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	30.768.465	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.07.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus anak korban kekerasan x 100	Persen	100	319.503.465	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak dibagi jumlah lembaga tersedia x 100	Persen	100	156.671.007	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	156.671.007	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Jumlah anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus dibagi jumlah kasus anak korban kekerasan x 100	Persen	100	72.047.760	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
208.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	2	72.047.760	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibagi jumlah lembaga tersedia x 100	Persen	100	90.784.698	DP3AP2KB	Kota Blitar
208.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	90.784.698	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	0,67		DP3AP2KB	Kota Blitar
	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rumus Total Fertility Rate	Indeks	2,13		DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Nilai rata-rata usia kawin pertama	Persen	23,01	104.829.060	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Nilai tengah Usia Kawin Perempuan	Tahun	22,25	79.500.386	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
214.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	24.999.936	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	3	54.500.450	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Jumlah profil kependudukan yang tersedia dibagi jumlah profil kependudukan yang dianalisis x 100	Persen	100	25.328.670	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	5.065.734	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	6	5.065.734	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	5.065.734	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	5.065.734	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah laporan hasil pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	1	5.065.734	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
214.03.00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Perhitungan cakupan PUS	Indeks	8,98	3.139.531.395	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Persentase KB Aktif	Jumlah pengguna KB aktif dibagi jumlah penduduk Usia Subur x 100	Persen	74,35			
214.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Kecamatan	3	821.485.455	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Organisasi	1	90.271.086	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	111.324.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4	157.445.042	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
214.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	6	129.273.577	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	4	210.992.773	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	3	122.178.777	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Jumlah IMP yang terfasilitasi dibagi jumlah IMP yang tersedia x 100	Persen	100	454.292.292	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	359	454.292.292	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Baru MKJP yang terfasilitasi dibagi jumlah capaian peserta KB Baru yang tersedia x 100	Persen	50,35	1.460.557.437	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	25	97.300.669	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
214.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	1	101.502.577	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	12	315.114.997	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	13	453.052.577	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	150	135.563.335	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	3	97.164.727	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	12	98.612.928	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	150	162.245.627	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB dibagi jumlah Kampung KB yang tersedia x 100	Persen	100	403.196.211	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
214.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	6	199.003.646	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen pelaksanaan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Dokumen	1	204.192.565	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.04.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Jumlah anggota kelompok Tribina dan UPPKS dibagi jumlah anggota yang ber-KB x 100	Persen	74,35	178.805.760	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Jumlah kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang mendapat fasilitasi dibagi jumlah kelompok Tribina, UPPKS dan Saka x 100	Persen	100	178.805.760	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	36,125,802	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	1	52,579,088	DP3AP2KB	Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN			UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
					2023			
					K	Rp		
214.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	46.600.870	DP3AP2KB	Kota Blitar
214.04.2.01.02	Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	13	43.500.000	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 – 2026

Kode						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A / 85,32		A / 85,34		A / 85,36		A / 85,36	-	DP3AP2KB	Kota Blitar	
2	0 8	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik / 86	4.256.749.155	Baik / 87	4.469.586.558	Baik / 88	4.693.065.938	Baik / 88	17.414.919.18 9	DP3AP2KB	Kota Blitar	
2	0 8	0 1		2 · 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia x 100	Persen	100	49.278.388	100	51.742.307	100	54.329.422	100	194.896.212	DP3AP2KB	Kota Blitar	
2	0 8	0 1		2 · 0 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	7	10.741.500	7	11.278.575	7	11.842.503	28	42.482.673	DP3AP2KB	Kota Blitar	
2	0 8	0 1		2 · 0 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	13	38.536.888	13	40.463.732	13	42.486.919	52	152.413.539	DP3AP2KB	Kota Blitar	

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar Tunjangan ASN	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	Persen	100	3.404.302.705	100	3.574.517.840	100	3.753.243.732	100	13.974.279.724	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	3.400.522.705	24	3.570.548.840	24	3.749.076.282	24	13.958.740.874	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Lapora n	2	3.780.000	2	3.969.000	2	4.167.450	8	15.538.850	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang tersedia x 100	Persen	100	93.181.476	100	97.840.549	100	102.732.577	100	370.019.832	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	205	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	99	41.622.276	99	43.703.389	99	45.888.559	297	165.899.454	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	01	205	00	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	33	51.559.200	33	54.137.160	33	56.844.018	33	204.120.378	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ketersediaan administrasi umum sesuai standar dibagi jumlah ketersediaan administrasi umum x 100	Persen	100	197.801.033	100	207.691.083	100	218.075.637	100	802.553.114	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.030.000	1	9.481.500	1	9.955.575	4	37.055.956	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	18.458.168	5	19.381.076	5	20.350.130	20	74.969.527	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	206	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	16.128.000	4	16.934.400	4	17.781.120	16	64.394.727	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	10.101.850	6	10.606.942	6	11.137.289	24	41.029.581	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	18.564.000	1	19.492.200	1	20.466.810	4	76.056.680	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokum en	24	6.480.000	24	6.804.000	24	7.144.200	96	25.828.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	60	115.483.775	60	121.257.963	60	127.320.861	240	469.047.849	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	1	3.555.240	1	3.733.002	1	3.919.652	4	14.170.594	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah penyediaan BMD yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah BMD tersedia x 100	Persen	100	12.780.000	100	13.419.000	100	14.089.950	100	48.112.950	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.780.000	1	13.419.000	1	14.089.950	4	48.112.950	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	01	2008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart dibagi jumlah jasa penunjang yang tersedia x 100	Persen	100	285.477.837	100	299.751.728	100	314.739.314	100	1.156.988.724	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	2008	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	1	1.319.648	1	1.385.630	1	1.454.911	4	5.359.869	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	2008	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	36	63.388.189	36	66.557.598	36	69.885.478	144	254.951.430	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	2008	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	2	220.770.000	2	231.808.500	2	243.398.925	8	896.677.425	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	2009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jumlah BMD yang terpelihara dibagi jumlah BMD yang tersedia x 100	Persen	100	213.927.716	100	224.624.051	100	235.855.306	100	868.068.633	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	01	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	117.093.856	41	122.948.548	41	129.095.976	164	475.587.340	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	28.822.860	42	30.264.003	42	31.777.203	168	117.066.666	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	66.011.000	1	69.311.500	1	72.777.127	4	268.109.627	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	01	209	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.000.000	3	2.100.000	3	2.205.000	12	7.305.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
					Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,2		75,50		76,59		76,59		DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah lembaga PUG yang aktif dibagi jumlah lembaga PUG yang tersedia x 100	Persen	100		100		100		100		DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibagi jumlah perangkat daerah keseluruhan x 100	Persen	100	1,016,548,692	100	1,067,376,129	100	1,120,744,940	100	5.043.573.201	DP3AP2KB	Kota Blitar	
						Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Jumlah perempuan pelaku sektor bisnis dibagi jumlah penduduk perempuan x 100	Persen	0,33		0,003		0,003						
						Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Jumlah perempuan pengambil keputusan dibagi jumlah penduduk perempuan x 100	Persen	47		45		48						
2	08	02		201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Jumlah dokumen ARG yang dianalisis dibagi jumlah kegiatan yang melaksanakan PPRG x 100	Persen	37	92,499,400	42	103,134,706	47	106,285,941	47	391.555.899	DP3AP2KB	Kota Blitar	
2	08	02		20012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PUG	Dokum en	3	92,499,400	3	103,134,706	4	106,285,941	13	391.555.899	DP3AP2KB	Kota Blitar	

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	0	0	2	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan dibagi jumlah perempuan sektor bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi x 100	Persen	20,54	374,509,900	20,67	395,713,644	20,73	405,819,671	20,73	3.782.332.402	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2	2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	Dokum en	7	238,509,900	8	245,057,644	8	250,660,208	30	820.276.168	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organis asi	1	136,000,000	2	150,656,000	2	155,159,463	6	450.508.038	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	02	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Organisasi	3	549,539,392	3	568,527,779	3	608,639,328	12	1.291.589.770	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	02	203	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	21	144,999,600	21	155,981,250	21	157,956,136	84	316.586.728	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	02	203	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	614	404,539,792	620	412,546,529	620	450,683,192	2468	903.371.698	DP3AP2KB	Kota Blitar
					Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan x 100	Persen	100		100		100				DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan yang tersedia x 100	Persen	100	333,488,753	100	341,166,936	100	349,229,926	100	1.669.273.673	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah perempuan yang aktif sosialisasi dibagi jumlah perempuan yang mengikuti sosialiasi x 100	Persen	100	78,098,700	100	80,151,452	100	81,263,668	100	239,513,820	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokum en	2	78,098,700	3	80,151,452	3	81,263,668	10	239,513,820	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	0	0	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus kekerasan pada perempuan x 100	Persen	100	162,962,320	100	164,856,925	100	167,449,771	100	495,269,016	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	03	2002	001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	12	44,999,900	14	45,683,125	16	47,067,281	43	137,750,306	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	03	2002	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layana n	2	117,962,420	2	119,173,800	2	120,382,490	8	357,518,710	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	03		2003	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan yang tersedia x 100	Persen	100	92,427,733	100	96,158,559	100	100,516,487	100	289,102,779	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	03	203	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	115	41,873,189	115	43,076,288	120	45,780,102	460	130,729,579	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	03	203	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50,554,544	3	53,082,271	3	54,736,385	10	158,373,200	DP3AP2KB	Kota Blitar
					Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak	Persen	100		100		100		100	-	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dibagi jumlah lembaga hak anak yang tersedia x 100	Persen	100	96,828,655	100	99,846,093	100	103,014,403	100	484.862.056	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	06	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibagi jumlah anak yang terfasilitasi x 100	Persen	100	33,641,758	100	35,323,846	100	37,823,846	100	138.829.220	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	06	201	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokum en	2	33,641,758	3	35,323,846	3	37,823,846	10	138.829.220	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam Indikator Kota Layak Anak dibagi jumlah lembaga yang tersedia x 100	Persen	100	63,186,897	100	64,522,247	100	65,190,557	100	254.814.836	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	06	202	001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak/O rang	100	29,341,586	100	28,984,671	110	27,876,102	410	117.349.029	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	06	2022		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	33,845,311	3	35,537,576	3	37,314,455	6	137.465.807	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus anak korban kekerasan x 100	Persen	100	326,052,320	100	332,928,618	100	340,148,731	100	1.631.899.594	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	07	2021		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak dibagi jumlah lembaga tersedia x 100	Persen	100	192,075,500	100	148,969,328	100	156,668,292	100	699.966.888	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	07	2021		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu		5	141,324,500	6	109,643,878	6	107,257,995	6	419,242,945	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	07	201	004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	orang	10	50,751,000	10	39,325,450	10	49,410,297	30	139,486,747	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Jumlah anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus dibagi jumlah kasus anak korban kekerasan x 100	Persen	100	42,499,700	100	85,249,800	100	95,000,000	100	213.062.915	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	07	202	005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	30	15,000,000	45	50,000,000	60	55,000,000	60	130,000,000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	07	202	006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	layanan	60	27,499,700	70	35,249,800	75	40,000,000	75	107,749,500	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	07	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibagi jumlah lembaga tersedia x 100	Persen	100	91,477,120	100	98,709,490	100	88,480,439	100	405.603.331	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	08	07	203	006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	348	91,477,120	400	98,709,490	420	88,480,439	420	263925829	DP3AP2KB	Kota Blitar
					Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	0,67		0,65		0,65		0,65		DP3AP2KB	Kota Blitar
					Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rumus Total Fertility Rate	Indeks	1,94		1		1		1,94	-	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Nilai rata-rata usia kawin pertama	Persen	25,10		25,14		25,18		25,21	551.663.553	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI		
									2024		2025		2026							
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	1	0	2	2	0	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Nilai tengah Usia Kawin Perempuan	Tahun	23,10	87,450,424	23,12	91,822,944	23,2	96,414,092	23,2	355.187.846	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	2	0	1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokum en	1	27,499,929	1	28,874,925	1	30,318,672	4	111.693.462	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	2	0	1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendi kan	5	59,950,495	5	62,948,019	7	66,095,420	20	243.494.384	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	0	2	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Jumlah profil kependudukan yang tersedia dibagi jumlah profil kependudukan yang dianalisis x 100	Persen	100	22,620,085	100	23,751,095	100	24,938,645	100	96.638.495	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Lapora n	1	4,524,017	1	4,750,219	1	4,987,729	4	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	2	0	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokum en	6	4,524,017	7	4,750,219	8	4,987,729	27	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	2	0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Lapora n	1	4,524,017	1	4,750,219	1	4,987,729	4	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	2	0	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokum en	1	4,524,017	2	4,750,219	2	4,987,729	6	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI	
									2024		2025		2026						
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	4,524,017	1	4,750,219	1	4,987,729	4	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Perhitungan cakupan PUS	Indeks	8,55	3,296,507,965	8,25	3,461,333,363	8,01	3,634,400,031	8,01	16.521.802.65 4	DP3AP2KB	Kota Blitar
						Persentase KB Aktif	Jumlah pengguna KB aktif dibagi jumlah penduduk Usia Subur x 100	Persen	74,4		74,46		74,67	74,67					
2	1	0	3	2	0	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Kecamatan	3	605,215,769	3	832,182,183	3	879,591,295	3	3.338.452.363	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	3	2	0	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	3	140,000,000	5	172,765,116	5	182,794,793	16	522.415.141	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	14	03	201	010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lapora n	4	64,500,000	5	81,432,348	5	90,503,966	18	919.213.869	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	201	011	Pelaksanaan Mekanisme Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lapora n	6	150,715,769	8	207,900,000	8	236,164,762	28	567.738.356	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	14	03	201	002	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4	100,000,000	5	169,584,719	5	175,563,955	18	611.309.327	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	2011	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Organisasi	1	150,000,000	1	200,500,000	1	194,563,819	4	312.522.734	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	202	002	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Jumlah IMP yang terfasilitasi dibagi jumlah IMP yang tersedia x 100	Persen	100	760,423,378	100	916,443,293	100	653,915,457	100	2.006.215.295	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	2002	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	361	335,784,378	361	407,443,293	361	425,565,457	1442	2.006.215.295	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Lapora n	4	424,639,000	4	509,000,000	4	228,350,000	12	315.000.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	0	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Baru MKJP yang terfasilitasi dibagi jumlah capaian peserta KB Baru yang tersedia x 100	Persen	50,45	1,563,118,818	50,56	1,327,858,582	50,76	1,559,551,509	50,76	6.337.813.800	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	14	03	203	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Lapora n	25	12,500,000	25	25,117,969	26	102,623,867	101	411.265.973	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	203	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1000	325,958,000	1000	351,693,864	1000	366,778,557	2952	1.384.406.977	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	203	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	15	1,083,210,818	17	511,011,423	20	534,061,994	20	2.000.676.561	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	203	007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	155	33,500,000	155	144,311,347	160	168,026,914	620	582.213.996	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	14	03	203	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Lapora n	3	16,500,000	5	99,960,956	5	102,459,003	16	410.658.618	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	203	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaran KB Pria	Orang	150	77,500,000	155	175,129,395	155	181,385,865	610	701.423.809	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	203	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	150	13,950,000	160	20,633,628	170	104,215,309	480	417.128.818	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB dibagi jumlah Kampung KB yang tersedia x 100	Persen	100	367,750,000	100	384,849,305	100	541,341,770	100	1.849.291.296	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	0	2	0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Dokum en	1	3,750,000	1	10,000,000	1	300,000,000	1	960.192.565	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	21	210,000,000	21	214,000,000	21	110,000,000	21	314.000.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampu ng	21	154,000,000	21	160,849,305	21	131,341,770	21	889.098.731	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Jumlah anggota kelompok Tribina dan UPPKS dibagi jumlah anggota yang ber-KB x 100	Persen	74,4	187,746,048	74,46	197,133,350	74,67	206,990,018	74,67	940.966.376	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	0	2		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Jumlah kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang mendapat fasilitas dibagi jumlah kelompok Tribina, UPPKS dan Saka x 100	Persen	100	107,746,048	100	107,133,350	100	106,990,018	100	770.675.176	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	0	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Lapora n/doku men	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	3	40.000.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lapora n	1	19,600,000	2	15,931,258	2	23,197,926	6	200.330.054	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit	20	25,884,868	20	27,000,000	20	20,590,000	73	186.974.868	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	1	0	2	0	Orientasi/Pelatih an Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	orang	807	16,682,092	807	20,622,092	807	22,622,092	807	156.052.078	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	14	04	201	026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	1	35,579,088	2	28,580,000	2	25,580,000	2	227.318.176	DP3AP2KB	Kota Blitar
2	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Perhitungan cakupan pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3	80,000,000	3	90,000,000	3	100,000,000	3	170.000.000	DP3AP2KB	Kota Blitar

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N							KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	14	04	202	005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Perhitungan cakupan pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3	40,000,000	3	45,000,000	3	50,000,000	3	135.000.000	DP3AP2KB	KOTA BLITAR
2	14	04	202	006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	9664	40,000,000	9664	45,000,000	9664	50,000,000	9664	135.000.000	DP3AP2KB	KOTA BLITAR

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2022 - 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
1	Menurunnya kesenjangan gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,80	67,87
		Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	47,26	47,28
		Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00
		Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00
2	Meningkatnya pengendalian penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	0,67
		Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,13	2,12
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (82)	A (83)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (82)	A (83)

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 - 2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap tahun			
				2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya pemberdayaan gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,2	75,50	76,59	76,59
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	0,65	0,65	0,65
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94	1,94	1,94	1,94
3	Meningkatnya tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,32)	A (85,34)	A (85,36)	A (85,36)
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,32)	A (85,34)	A (85,36)	A (85,36)

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	Persen	Jumlah Kelembagaan PUG yang aktif dibagi Jumlah Kelembagaan PUG dikali 100	47,25	47,26	47,28	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di kali 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan dikali 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Persen	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur	2,14	2,13	2,12	1,94	1,94	1,94	1,94

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas P3AP2KB Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD Rumus : Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD dibagi jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD X 100%	25,42	26	27	37	42	47	47
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota Rumus : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang di dampingi, dibagi jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun) X 100%	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Rumus : Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan di bagi jumlah penduduk perempuan X 100.000	0,02	0,014	0,012	0,008	0,006	0,004	0,008

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Angka	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility rate) Rumus : $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i} \times k$ TFR : Angka Kelahiran Total ASFR : Angka Kelahiran menurut kelompok umur Bi : jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur I pada tahun tertentu Pi : jumlah penduduk perempuan kelompok umur I pada pertengahan tahun yang sama i : kelompok umur (i = 1 kelompok umur 15-19, 1=2 untuk kelompok umur 20-24,....., I=7 untuk kelompok umur 45-49 K ; bilangan konstanta biasanya 1000	2,03	2,04	2,03	1,94	1,94	1,94	1,94
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Angka	$ASFR_i = \frac{b_i}{P_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15 - 19 tahun	20,02	20,5	20,75	21	21,25	21,5	21,5

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	Rumus : jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) di bagi jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) X 100%	25	27,5	30	32,5	34,5	37,5	37,5
7	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence rate/mCPR)	Persen	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern Rumus : Jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur X 100%	74,31	74,32	74,35	74,4	74,46	74,67	74,67
8	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	Rumus : Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP dibagi jumlah faskes X 100%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	Rumus : Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah PUS X 100%	43,77	43,8	43,95	44,1	44,25	44,50	44,50
10	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persen	Rumus : Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern di bagi jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan X 100%. KB Pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari.	45,48	45,5	45,6	45,75	45,8	45,95	45,95

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	Daftar keluarahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kabupaten/Kota. Data dan informasi yang diambil adalah 50% dari total keluarahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	67,79	67,8	67,95	68,01	68,03	68,05	68,05
12	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	Rumus : Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI di bagi jumlah keluarga PBI x 100%. Penerima bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah	24,3	24,5	24,75	24,85	24,95	25,04	25,04

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB tahun 2022-2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan dan aturan yang mendasari perubahan rencana pembangunan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas P3AP2KB Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas P3AP2KB Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi

acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.